


RENCANA KERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



 (0768) 22909

 inspektorat@inhilkab.go.id

 <http://inspektorat.inhilkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat di selesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026 dan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan kedepannya, namun demikian dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini, kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk perbaikan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah kedepannya. Harapan Kami agar Rancangan Akhir Renja ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Juli 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,



N. Pamungkas, S.STP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780418 199701 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review Terhadap RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3. Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan	34

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
	DAERAH	44
BAB V	PENUTUP	51

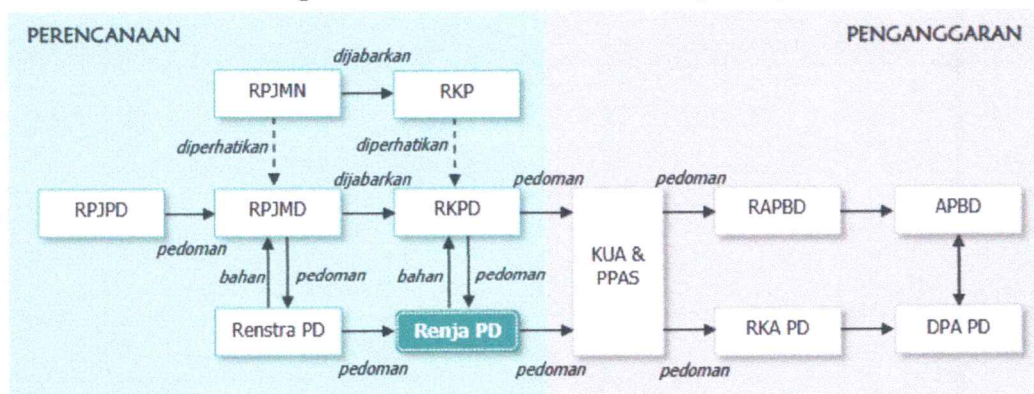
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Rancangan Akhir Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, dimana penyusunan Rancangan Akhir Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 43).
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4).
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 5).

17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025, dengan mengalokasikan sumber daya manusia yang dimiliki.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
2. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan disajikan perkiraan capaian target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang capaian realisasinya rendah dan juga melebihi target sampai dengan tahun 2024 dikarenakan terdapat perbedaan indikator dan satuan target pada Renstra Perubahan tahun 2018-2023 dengan RPD tahun 2024-2026. Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.01.	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	22	99,61	98	98	1	98	295,61	13,44
6.01.01.02.01	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90	90	90	1	90	270	3,00
6.01.01.02.01.06	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	7	7	7	7	1	7	21	3,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)
6.01.01.02.02	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	1	100	300	3,00
6.01.01.02.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	53	52	51	51	1	51	154	2,91
6.01.01.02.05	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	1	100	300	3,00
6.01.01.02.05.09	1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	3	2	8	8	1	5	15	5,00
6.01.01.02.06	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	1	100	300	3,00
6.01.01.02.06.01	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2	1	0,5	1	4	2,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)	
6.01.01.02.06.02		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	0	5	5	1	4	9	1,80
6.01.01.02.06.04		1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4	4	1	4	12	3,00
6.01.01.02.06.06		1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	8	7	8	8	1	8	23	2,88
6.01.01.02.06.09		1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	30	30	45	45	1	45	120	4,00
6.01.01.02.07		1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Penunjang Urusan kantor (Dengan Satuan:Persen)	300	0	100	100	1	100	200	0,67
6.01.01.02.07.02		1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	0	4	4	1	4	8	1,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)
6.01.01.02.08	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	1	100	300	3,00
6.01.01.02.08.01		1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	1	1	1	1	102	1,02
6.01.01.02.08.02		1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	1	1	1	1	6	1,50
6.01.01.02.08.04		1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	14	13	1	1	1	1	15	1,07
6.01.01.02.09	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	1	100	300	3,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Sub Kegiatan/ s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)	
6.01.01.02.09.01			1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	11	11	16	11	0,69	11	33	3,00
6.01.01.02.09.06			1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	30	30	0	0	0	30	60	2,00
6.01.01.02.09.010			1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	1	1	1	1	4	2,00
6.01.02.	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	85	86,3	74	66	0,89	74	226,3	2,66
6.01.02.02.01		2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan (Dengan Satuan:Laporan)	85	86,3	80	68	0,85	80	234,3	2,76
6.01.02.02.01.01			2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	4	4	3	0,75	15	22	4,40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)	
6.01.02.02.01.02			2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	4	5	5	1	8	17	3,40
6.01.02.02.01.03			2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	5	4	60	60	1	60	124	24,80
6.01.02.02.01.04			2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1	1	1	1	3	3,00
6.01.02.02.01.05			2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Dengan Satuan:Laporan)	15	14	16	15	0,94	24	53	3,53
6.01.02.02.01.06			2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan:Kesepakatan)	2	2	3	3	1	3	8	4,00
6.01.02.02.01.07			2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	77	66	120	120	1	120	306	3,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)		
6.01.02.02.02		2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselenggarakan (Dengan Satuan:Laporan)	85	86,3	77	65	84	77	228,3	2,69	
6.01.02.02.02.01			2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	77	75,82	78	65	0,83	0	140,82	1,83
6.01.02.02.02.02			2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	5	23	10	10	1	10	43	8,60
6.01.03.		3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persen)	74	47,61	80	69	0,86	80	196,61	2,66
6.01.03.02.02			3.1	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	40	27	40	36	0,9	40	103	2,58
6.01.03.02.02.01			3.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:perangkat daerah)	17	0	17	17	1	17	34	2,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	(8 = 7/6)	9	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4)
6.01.03.02.02.02			3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)	4	35	3	3	1	3	41	10,25
6.01.03.02.02.03			3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	4	4	4	1	4	12	12,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah adalah Lembaga Teknis dibidang Pengawasan yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan pemerintahan desa dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari :

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun* 2025	Tahun** 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)		(9)
1	Indeks Maturitas SPIP	Level		√	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	-
2	Level Kapabilitas APIP	Level		√	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	-
3	Nilai Evaluasi RB Inspektorat Daerah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	Nilai		√	25	23,75	24,00	24,25	N/A	N/A	-	-	PermenpanRB No 30 Tahun 2023 (evaluasi RB dilakukan untuk Pemda dan tidak lagi dilakukan untuk OPD)
4	Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kab. Inhil	Nilai		√	BB (75)	BB (78,48)	BB (79,75)	BB (80,75)	BB (76,15)	N/A	BB (79,75)	BB (80,75)	Tahun 2024 belum dilakukan penilaian

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun 2024 Tujuan “Strategis Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengawasan Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik”. Indikator kinerja untuk mengukur tujuan strategis meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik yaitu Indeks Maturitas SPIP dengan capaiannya dari target tercapai dengan realisasi Level 3 dari target yang ditetapkan Level 3, jika dibandingkan tahun 2022 capaian indikator ini tercapai dengan realisasi Level 3 dari target yang ditentukan Level 3. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non-kumulatif.

Terdapat 2 (dua) sasaran tahun 2024 yang diukur pada tujuan strategis meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu:

a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

Indikator kinerja level kapabilitas APIP tahun 2024 dengan proyeksi capaian level 3, jika dibandingkan tahun 2023 capaian indikator ini juga tercapai, dengan realisasi level 3 dari target yang ditetapkan level 3, dengan rata-rata capaian kinerja tercapai. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non-kumulatif.

b. Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kab. Inhil

Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kab. Inhil Tahun 2024 dengan proyeksi capaian BB, sedangkan tahun 2023 laporan hasil evaluasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir belum terbit.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Inspektorat Daerah.

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Peningkatan Kapabilitas APIP;
2. Tuntutan meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Kurang optimalnya OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal dalam melaksanakan sistem pengawasan intern berbasis manajemen risiko (risk based management);
5. Pengelolaan tugas pengawasan daerah belum didukung sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan memadai; dan
6. Mendorong capaian program pemberantasan korupsi.

The Institutes of Internal Auditors (IA), mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir internal audit: "Internal audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.” Peran mutakhir internal audit tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir internal audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Inspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan Inspektorat.

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Komitmen Bupati Indragiri Hilir dalam mendukung peran Inspektorat dan dorongan supaya Inspektorat tidak “*doing business as usual*” atau bertahan dalam zona nyaman, Inspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya;

3. Adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rancangan Akhir Renja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan akhir dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini diuraikan review terhadap rancangan akhir renja dengan RKPD tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Inhil	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan : Persen)	100	18.480.874	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Inhil	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan : Persen)	100	18.480.874	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (Dengan Satuan : Persen)	100	160.997	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (Dengan Satuan : Persen)	100	160.997	
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	137.280	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	137.280	
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.288	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.288	
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.762	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.762	
	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.018	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.018	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	
	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.461		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.461	
	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	12.187		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	12.187	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	9.160.049	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	9.160.049		
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	59	9.157.977		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	59	9.157.977	
	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.072		1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.072	
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	2.193.399	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Inhil	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	2.193.399		
	1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Kab. Inhil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3	101.500		1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Kab. Inhil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3	101.500	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)			(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
			Atribut Kelengkapannya		Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)					Atribut Kelengkapannya		Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		
		1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Inhil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	51	1.118.935		1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Inhil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	51	1.118.935
		1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	200	152.539		1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	200	152.539
		1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	58	820.424		1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	58	820.424
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Inhil	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	4.133.297	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Inhil	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	4.133.297
		1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5.146		1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5.146
		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	863.958		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	863.958
		1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	7.244		1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	7.244

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	
		1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	131.178		1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	131.178	
		1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Inhil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	57.756		1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Inhil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	57.756	
		1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	8	15.000		1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	8	15.000	
		1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	3.017.264		1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	3.017.264	
		1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	35.7750		1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	35.7750	
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Inhil	Persentase ketersediaan Barang Penunjang Urusan kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	1.759.668	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Inhil	Persentase ketersediaan Barang Penunjang Urusan kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	1.759.668	
		1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	
		1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	19	1.596.400		1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	19	1.596.400	
		1.5.3	Pengadaan Mebel	Kab. Inhil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	83	163.268		1.5.3	Pengadaan Mebel	Kab. Inhil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	83	163.268	
	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	382.562	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	382.562	
		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	5.500		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	5.500	
		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	142.220		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	142.220	
		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	234.842		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	234.842	
	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	690.900	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	690.900	
		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	69.400		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	69.400	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)		
	1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	16	43.000	1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	16	43.000	
	1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	30	40.000	1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	30	40.000	
	1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	372.000	1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	372.000	
	1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	166.500	1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	166.500	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Kab. Inhil	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	80	4.368.048	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Kab. Inhil	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	80	4.368.048	
	2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Inhil	Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan (Dengan Satuan:Laporan)	114	3.472.753	2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Inhil	Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan (Dengan Satuan:Laporan)	114	3.472.753	
	2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	180.686	2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	180.686	
	2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	557.166	2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	557.166	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	
		2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	91	706.953		2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	91	706.953
		2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	26.200		2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	26.200
		2.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Dengan Satuan:Laporan)	13	501.622		2.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Dengan Satuan:Laporan)	13	501.622
		2.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Inhil	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan:Kesepakatan)	1	1.361.487		2.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Inhil	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan:Kesepakatan)	1	1.361.487
		2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	2	138.638		2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	2	138.638
		2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Inhil	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselenggarakan (Dengan Satuan:Laporan)	80	895.295		2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Inhil	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselenggarakan (Dengan Satuan:Laporan)	80	895.295
		2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	2	22.585		2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	2	22.585
		2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	83	872.710		2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	83	872.710

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Kab. Inhil	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persen)	73	807.781	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Kab. Inhil	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persen)	73	807.781		
	3.1	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Inhil	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	9	807.781	3.1	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Inhil	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	9	807.781		
		3.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:perangkat daerah)	35	99.128	3.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:perangkat daerah)	35	99.128	
		3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Inhil	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)	31	142.176	3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Inhil	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)	31	142.176	
		3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Inhil	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	566.476	3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Inhil	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	566.476	
	TOTAL					23.656.704						23.656.704		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak terdapat usulan masyarakat pada Program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 karena Program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kegiatan yang berfokus pada bidang pengawasan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah perangkat daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya, kebijakan nasional yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti Pembentukan zona integritas di Perangkat Daerah, strategi nasional pencegahan korupsi, survei penilaian integritas (SPI), dan *monitoring centre prevention* (MCP).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun (tahun 2024-2026), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (Sumber daya manusia, keuangan dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, yaitu :

1. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional.

2. Menciptakan akuntabilitas pemerintah kabupaten yang handal.

Sasaran Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 3 (tiga) periode secara tahunan (2024-2026) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun tujuan dan sasaran yang dapat diidentifikasi untuk diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	4	5
1.	Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap tata kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik	Level Maturitas SPIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)
1.1	Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan internal Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)
1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Inhil	Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kab. Inhil	BB (78.48)	BB (79.75)	A (80.75)

Berdasarkan tabel 3.1, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan Level Maturitas SPIP yaitu berada di Level 3 dengan nilai 3,00 , dan Kapabilitas APIP yaitu berada di Level 3 dengan nilai 3,00. Dan untuk Nilai AKIP Inspektorat Daerah yaitu BB dengan nilai 78,48.

3.3. Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini ditujukan menunjang urusan kegiatan di Inspektorat Daerah.
2. Program Penyelenggaran Pengawasan
Program ini ditujukan guna peningkatan kualitas pengawasan aparat pengawasan fungsional internal pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Program ini ditujukan untuk:
 - a. Perumusan Kebijakan :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
 - 2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi
 - 3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - 4) Pendampingan, asistensi, verifikasi penegakkan integritas

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis organisasi. Adapun yang merupakan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi :
- a. Pendampingan dan Asistensi

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan keyakinan yang memadai (*assurance activities*) memberikan peringatan dini (*anti corruption activities*), meningkatkan kualitas (*consulting activities*), penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berikut ini disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
61	INSPEKTORAT DAERAH		Kab. Inhil						
611	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	18.480.874.346			100 Persen	11.495.496.000
6112.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	160.997.750			100 Persen	124.431.000
6112.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	3 Dokumen	137.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	74.682.000
6112.012	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	1 Dokumen	4.288.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	13.425.000
6112.013	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	1 Dokumen	2.762.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	13.425.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	1 Dokumen	1.018.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5.466.000
6 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	1 Dokumen	3.461.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5.466.000
6 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	2 Laporan	12.187.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	11.967.000
6 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	9.160.049.181			100 Persen	7.823.581.000
6 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan : Orang/bulan)	Kab. Inhil	59 Orang/bulan	9.157.977.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65 Orang/bulan	7.822.040.000
6 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	1 Laporan	2.072.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	1.541.000
6 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi sarana dan prasarana aparatur perkantoran (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	2.193.399.350			100 Persen	710.131.000
6 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan : Paket)	Kab. Inhil	3 Paket	101.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	65.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	Kab. Inhil	51 Orang	1.118.935.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	390.300.000
6 1 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan : Orang)	Kab. Inhil	200 Orang	152.539.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Orang	89.831.000
6 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan : Orang)	Kab. Inhil	58 Orang	820.424.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Orang	165.000.000
6 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	4.133.297.415			100 Persen	1.448.045.000
6 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Kab. Inhil	5 Paket	5.146.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	2.684.000
6 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Kab. Inhil	12 Paket	863.958.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	150.000.000
6 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Kab. Inhil	3 Paket	7.244.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	30.743.000
6 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Kab. Inhil	5 Paket	131.178.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	110.600.000
6 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Kab. Inhil	5 Paket	57.756.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	37.808.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	8 Dokumen	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Dokumen	11.681.000
6 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	12 Laporan	3.017.264.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Laporan	1.088.954.000
6 1 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	12 Dokumen	35.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Dokumen	15.575.000
6 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Penunjang Urusan kantor (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	1.759.668.250			100 Persen	884.070.000
6 1 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	0 Unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	350.000.000
6 1 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	19 Unit	1.596.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	390.000.000
6 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	83 Unit	163.268.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Unit	144.070.000
6 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	382.562.400			100 Persen	247.913.000
6 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	12 Laporan	5.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	4.283.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	4 Laporan	142.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	120.111.000
6 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	3 Laporan	234.842.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	123.519.000
6 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	100 Persen	690.900.000			100 Persen	403.500.000
6 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	10 Unit	69.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Unit	49.000.000
6 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	16 Unit	43.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	30.000.000
6 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	30 Unit	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Unit	12.460.000
6 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	2 Unit	372.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	105.000.000
6 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	Kab. Inhil	2 Unit	166.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	60.865.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan yang diselesaikan (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	80 Persen	4.368.048.785			85 Persen	3.519.978.000
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	114 Laporan	3.472.753.495			75 Persen	2.781.251.000
6 1 2 2.01 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	3 Laporan	180.686.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	124.190.000
6 1 2 2.01 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	6 Laporan	557.166.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	201.650.000
6 1 2 2.01 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	91 Laporan	706.953.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Laporan	700.539.000
6 1 2 2.01 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	1 Laporan	26.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	27.381.000
6 1 2 2.01 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	13 Laporan	501.622.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	371.107.000
6 1 2 2.01 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan : Kesepakatan)	Kab. Inhil	1 Kesepakatan	1.361.487.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Kesepakatan	752.847.000
6 1 2 2.01 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan : Dokumen)	Kab. Inhil	2 Dokumen	138.638.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	603.537.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselenggarakan (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	83 Laporan	895.295.290			15 Laporan	738.727.000
6 1 2 2.02 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	2 Laporan	22.585.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	184.598.000
6 1 2 2.02 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan : Laporan)	Kab. Inhil	83 Laporan	872.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Laporan	554.129.000
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan : Persen)	Kab. Inhil	73 Persen	807.781.116			75 Persen	748.035.000
6 1 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Dengan Satuan : Kegiatan)	Kab. Inhil	9 Kegiatan	807.781.116			7 Kegiatan	748.035.000
6 1 3 2.02 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Perangkat Daerah)	Kab. Inhil	35 Perangkat daerah	99.128.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Perangkat daerah	63.468.000
6 1 3 2.02 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan : Perangkat Daerah)	Kab. Inhil	31 Perangkat daerah	142.176.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Perangkat daerah	53.774.000
6 1 3 2.02 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan : Kegiatan)	Kab. Inhil	4 Kegiatan	566.476.766	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Kegiatan	630.793.000
TOTAL					23.656.704.247				15.763.509.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pembinaan serta Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan
Inspektorat daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				23.656.704.247,00					15.763.509.000,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				23.656.704.247,00					15.763.509.000,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				23.656.704.247,00					15.763.509.000,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.480.874.346,00				-	11.495.496.000,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	160.997.750,00				100 Persen	124.431.000,00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	137.280.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	74.682.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	4.288.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	13.425.000,00
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	2.762.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	13.425.000,00
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.018.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.466.000,00
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	3.461.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.466.000,00
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	12.187.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	11.967.000,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan	100 Persen	100 Persen	9.160.049.181,00				100 Persen	7.823.581.000,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.157.977.181,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65 Orang/bulan	7.822.040.000,00
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	2.072.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	#NAME?

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	2.193.399.350,00				100 Persen	710.131.000,00
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	3 Paket	101.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	65.000.000,00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	63 Orang	1.118.935.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Orang	390.300.000,00
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang	200 Orang	152.539.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Orang	89.831.000,00
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	58 Orang	820.424.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang	165.000.000,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100 Persen	100 Persen	4.133.297.415,00				100 Persen	1.448.045.000,00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	5.146.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	2.684.000,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	15 Paket	863.958.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	150.000.000,00
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	3 Paket	7.244.191,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	30.743.000,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	131.178.424,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	110.600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5 Paket	57.756.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	37.808.000,00
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	11.681.000,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 Laporan	3.017.264.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Laporan	1.088.954.000,00
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	135 Dokumen	12 Dokumen	35.750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Dokumen	15.575.000,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	100 Persen	1.759.668.250,00				100 Persen	884.070.000,00
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		1 Unit	350.000.000,00
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	22 Unit	1.596.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	390.000.000,00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	212 Unit	61 Unit	163.268.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Unit	144.070.000,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 Persen	100 Persen	382.562.400,00				100 Persen	247.913.000,00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.283.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	142.220.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	120.111.000,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	3 Laporan	234.842.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	123.519.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	100 Persen	690.900.000,00				100 Persen	257.325.000,00
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	10 Unit	69.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Unit	49.000.000,00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	16 Unit	43.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22 Unit	30.000.000,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	30 Unit	40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Unit	12.460.000,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	372.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	105.000.000,00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	166.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80.885.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang diselesaikan	80 Persen	80 Persen	4.368.048.785,00				80 Persen	3.519.978.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan	270 Laporan	94 Laporan	3.472.753.495,00				75 Laporan	2.781.251.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	3 Laporan	180.686.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	124.190.000,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	557.166.163,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	201.650.000,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	215 Laporan	91 Laporan	706.953.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Laporan	700.539.000,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1 Laporan	26.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	27.381.000,00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan	13 Laporan	501.622.650,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	371.107.000,00
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1.361.487.058,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Kesepakatan	752.847.000,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	2 Dokumen	138.638.524,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	603.537.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang diselenggarakan	52 Laporan	17 Laporan	895.295.290,00				15 Laporan	738.727.000,00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Laporan	2 Laporan	22.585.290,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	184.598.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	83 Laporan	872.710.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	554.129.000,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan	73 %	73 %	807.781.116,00				73 %	748.035.000,00
6.01.03.2.02	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	807.781.116,00				7 Kegiatan	748.035.000,00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 perangkat daerah	35 perangkat daerah	99.128.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 perangkat daerah	63.468.000,00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	31 perangkat daerah	142.176.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 perangkat daerah	53.774.000,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	566.476.766,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Kegiatan	630.793.000,00
J U M L A H					23.656.704.247,00					15.763.509.000,00

BAB V PENUTUP

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Akhir Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Tembilahan, Juli 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,



Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780418 199701 1 001